

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Interes Media, 2014

Abdul Wahab solichin, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, 1997, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.

Agus Hadi Purwantomo, *Emergency Procedure dan SAR*, 2018, Yogyakarta: Deepublish.

AH. Purwantomo, *Emergency procedure dan SAR*. 2018. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Arso Martopo, *Peraturan International Tentang Pencegahan Tubrukan Dilaut 1972. 1985*, Tim Penyusun PIP Semarang.

Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 1994, Jakarta: PT. Karya Unipress.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Soebekti, *Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL 1972) Tubrukan Air Pedalaman RI bandar 1925*, Yayasan Pendidikan Pelayaran Jakarta, 1994.
- Dunn William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada. 2003.
- E.W. Manokime *The VNR Dictionary of Ships & The Sea*. Vam Nostrand Reinhold, New York., 1981.
- Hadi Agus Purwantomo, *COLREG 1972 dan Dinas Jaga Anjungan*, 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 39
- Indonesian Marine Council. Kebijakan Kelautan Indonesia*, 2012, Buku I. Jakarta: *Ministry of Maritime Affairs and Fisheries*. Hal. 45
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244.
- Istopo, *Peraturan International Tentang Pencegahan Tubrukan di Laut*. Jakarta: Yayasan CAAIP, 1972, hal. 5
- Jimly Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- John Noel. *The VNR Dictionary of Ships & The Sea*. Vam Nostrand Reinhold, New York.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. Tahun 1998
- Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, 2015, Gadjah Mada University Press.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Nugroho, *Panduan Lengkap Ikan Konsumsi Air Tawar Populer (Cetakan Ke-3)*. 2013, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Paputungan. Modul Bahan Ajar P2TL dan Dinas Jaga. Makassar: Marine Studies Polytechnic Of Makassar. 1995
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pressman, J.L dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great. Expectation in Washington Are Dased in Oakland*, 1973, London: California.
- Purwantomo Hadi Agus. COLREG 1972 dan Dinas Jaga Anjung. 2004.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001.
- Rustin Kamaludin. *Ekonomi Transportasi*, 1986, Jakarta: Penerbit Ghalia
- Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996.
- Sareati Hasugian, "Pemetaan Karakteristik Kecelakaan Kapal di Perairan Indonesia Berdasarkan Investigasi KNKT" Politeknik Pelayaran Surabaya, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. 2000. Citra Aditya Bakti.

- Soebekti, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut 1972. 1994. Yayasan Pendidikan Pelayaran Djadajat Jakarta.
- Soerdjono, Soekanto. Benerapa Permasalahan Hukum dalam Perangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta. 1983.
- Subarindjo, Djoko. Olah Gerak dan Pengendalian Kapal. PIP SEMARANG, Semarang, 2011.
- Subarindjo. . Olah Gerak dan Pengendalian Kapal. PIP SEMARANG, Semarang, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Sudjatmiko, Pokok- pokok Pelayaran Niaga, 1997, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
- Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, 2016, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyono dan Subandrijo, J., COLREG 1972 1972 dan Dinas Jaga Anjungan, CV. Budi Utama, Yogyakarta. 2016.

Laode M. Kamaludin, *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*, 2005, Malang, UMM Press : Malang. Hal 32

## **B. Undang-undang**

*Convention On The International Regulation For Preventing Collusion At sea 1972 (COLREG 1972)*

Kementerian Perhubungan RI. Peraturan Menteri Perhubungan no KM 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional, 2005.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 tahun 2001. Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran.

Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) Tahun 1972

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017

## **C. Jurnal**

A. Atamimi, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

*Admiralty List Of Radio Signals, Vol 7 NP 287(2). Published By The Hydrographer Of The Navy, Taunton, Somerset, United Kingdom*

Andiri. *Quality of Public Transport Service (Descriptive Study About Quality of Passenger Ship Service Gresik Route - Bawean Port Gresik )*. 2015, Kebijakan Dan Manajemen Publik.

Baldau, Claresta, & Nugroho, T.F. *Vessel Traffic Services (VTS) to Ensure Safety of Maritime Transportation, 2020, Studies of Potentials in Sunda Strait. Maritime Safet International Conference.*

Bappenas, *The Direction of maritime development in Indonesia, 2017, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*

Daryanto, *Dari Kluster Menuju Peningkatan Daya Saing Industry Perikanan. Bulletin Craby & Starky. Edisi Januari. 2007.* Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Perikanan.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Dewantoro & Hartanto,. *Peran Vessel Traffic Services (VTS) untu Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 2019, Proceeding Seminar Nasional Politeknik Bumi Akpelni.*

Malirmasele. *Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli*). 2004. Thesis. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Sekretariat Kabinet RI. *Rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia 2016 – 2019, 2017.*

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua , cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Tim Pokja Lemdiklat Polri, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL). Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi, Jakarta. 2019.

Yudhistira & Sofiyandi, *Seaport status, port access, and regional economic development in Indonesia*, 2017, *Maritime Economics & Logistics*

#### **D. WEB**

Badudu J.S. (1996). Penulisan Pengertian Penerapan (online), [http : //eprints.uny.ac.id/.pdf](http://eprints.uny.ac.id/.pdf). Diakses pada tanggal 22/September 2023.

Hanouz, Geiger & Sean, The Global Enabling Trade Report 2014. World Economic Forum. 2017, <https://doi.org/92-95044-53-3> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

Hobbystar, Parlin, Analisis Penerapan Collision Regulation 1972 Terhadap Keselamatan Pelayaran Kapal Milik Serunting Sriwijaya Palembang Tahun 2007. <http://expressclass.blogspot.com/2009/02/analisis-penerapan-collision-regulation.html> diakses Tanggal 19 Oktober 2023

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 8 Mei 2023 pukul 12.20

Komite Nasional Keselamatan Transportasi. (2003). Tubrukan Kapal Antara MV Uni Chart dengan KM Mandiri Nusantara (online).

[http://kemhubri.dephub.go.id/knkt/ntsc\\_maritime /laut/2003/tubrukan MV uni\\_chart\\_dengan\\_km\\_mandiri\\_nusa\\_final](http://kemhubri.dephub.go.id/knkt/ntsc_maritime_laut/2003/tubrukan_MV_uni_chart_dengan_km_mandiri_nusa_final). Diakses pada tanggal 20 September 2023

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, [https:// doi.org /10.1017 / CBO9781107415324](https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324) diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.

World Bank. International LPI from 2007 to 2016, 2016, New York: The world bank group. Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2023 <http://lpi.worldbank.org/international/global>.

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2016–2017. World Economic Forum Reports 2016. Geneva. 2016, Diakses pada Tanggal 18 Oktober 2023 <https://doi.org/92-95044>.